

ABSTRAK

Tanah hak pakai menurut Pasal 41 UUPA adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Dalam praktiknya penerbitan sertipikat hak pakai sering mengalami permasalahan salah satunya disebabkan adanya tumpang tindih dengan *groondkart*. Seperti pada kasus yang terjadi antara PT. KAI dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dalam sengketa putusan nomor : 023/G/2017/PTUN.Smg.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dibatalkan oleh PTUN Semarang, dan mengetahui pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam memutus perkara antara PT. KAI dengan Kantor Pertanahan Kota Tegal berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 023/G/2017/PTUN.Smg

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, sehingga jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta kemudian dianalisis berdasarkan metode normatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebab dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN Semarang karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, didasarkan adanya *Grondkaart* PT. KAI yang diakui keberadaannya. Pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa ini yaitu menetapkan secara sah bahwa objek sengketa tersebut menjadi milik PT. KAI, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal wajib mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu putusan majelis hakim telah tepat untuk memenangkan PT.KAI yang berhak secara sah menjadi pemilik objek sengketa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat mengenai penerbitan objek sengketa serta adanya *grondkaart* milik PT.KAI.

Kata Kunci: *Tanah Hak Pakai, Penerbitan Sertipikat Hak Pakai, Sengketa Tanah, Grondkaart*

ABSTRACT

According to Article 41 of the Basic Agrarian Law, land use rights are rights to use and/or collect produce from land directly controlled by the state or other people. In practice, issuing usufructuary certificates often experiences problems, one of which is due to overlap with groondkart. As in the case that occurred between PT. KAI and the Head of the Tegal City Land Office in the dispute over decision number: 023/G/2017/PTUN.Smg.

This research aims to determine whether the Certificate of Use Rights issued by the Head of the Tegal City Land Office was canceled by the Semarang State Administrative Court and the considerations of the State Administrative Judge in deciding the case between PT. KAI and the Tegal City Land Office based on the State Administrative Court Decision Study Number: 023/G/2017/PTUN.Smg

The research method used is normative juridical. The type of data to be used is secondary data, namely in the form of literature studies and laws and regulations related to the problems in this research, and then analyzed based on qualitative normative methods.

The results of this study explain that the reason for the cancellation of the State Administrative Decision by the Semarang State Administrative Court is that the Head of the Tegal City Land Office has violated the provisions of the applicable Laws and Regulations and is contrary to the General Principles of Good Governance based on Article 53 Paragraph (2) letters a and b of Law Number 9 of 2004 concerning the First Amendment to Law Number 5 of 2009 concerning the State Administrative Court. In addition, based on the Grondkaart PT. KAI whose existence is recognized. The judge's consideration in deciding this dispute is to legally determine that the object of the dispute belongs to PT. KAI,

This study concludes that the panel of judges' decision is right to win PT.KAI is legally entitled to become the owner of the object of dispute. It follows the laws and regulations that govern and are based on solid evidence regarding the issuance of the disputed object and the existence of a grondkaart belonging to PT.KAI

Keywords: Land Use Rights, Issuance of Use Rights Certificates, Land Disputes, Grondkaart